



**#bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

JOMBANG
SANTRI



2025 RENCANA KERJA

Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Jombang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025.

Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang merupakan dokumen perencanaan kinerja untuk periode 1 (satu) tahun, yang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam satu tahun anggaran yang memuat, tujuan, sasaran, dan target capaian kinerja yang akan dicapai pada tahun 2025. Oleh karenanya, dokumen ini akan menjadi sebagai acuan bagi aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam penyusunan anggaran dalam hal ini Rencana Kinerja (Renja) 2025.

Besar harapan kami bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang bisa membantu mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang melalui program-program yang telah disusun baik secara langsung maupun tidak langsung, dan akhirnya membawa Kabupaten Jombang menuju pembangunan yang lebih baik.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 ini mampu meningkatkan kinerja peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Jombang.



Jombang, 17 Juli 2024

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**

HARTONO, S.Sos., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691002 198903 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 1

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Rencana Kerja 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD..... 5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD 10

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD 16

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD 17

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 23

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 23

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi 27

3.2 Tujuan dan Sasaran 28

3.3 Program dan Kegiatan..... 28

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan..... 35

BAB V PENUTUP 48

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang pengelolaan pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).

Sebagai penjabaran Renstra OPD, maka OPD harus membuat Rencana Pembangunan Tahunan yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode 1 (satu) tahun. Untuk menindaklanjuti evaluasi kinerja anggaran, maka dilakukan penyesuaian anggaran dan perlu disusun Rencana Kerja Perubahan OPD untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan evaluasi pada pertengahan tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan OPD tetap berpedoman pada Review Renstra OPD dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam pelaksanaan perubahan anggaran tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam Pengelolaan pendapatan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 berlandaskan dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026;
18. Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang;
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 80 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 46 Tahun 2024 tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan P-RKPD Kabupaten Jombang Tahun 2024; dan
21. Surat Edaran Bupati Jombang Nomor 050/844/415.01/2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan Daerah guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan;
2. Mempermudah pelaksanaan koordinasi serta pengendalian kegiatan yang mencakup monitoring, analisis, evaluasi kegiatan yang dilaksanakan dengan instansi terkait baik secara internal maupun secara eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pejabat terkait tentang rencana kinerja tahunan sehingga mempermudah dalam menentukan program kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahunnya;
4. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur terutama aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menentukan prioritas-prioritas program di bidang pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan bisa tercapai tepat waktu.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan di bidang Pendapatan Daerah yang lebih berkualitas;

2. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntable;
3. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas utama dalam pelaksanaan program kegiatan sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan setiap tahunnya dapat tercapai dengan baik;
4. Tersedianya informasi tentang Pendapatan daerah yang cepat dan akurat;
5. Tersedianya piranti pendukung Pendapatan daerah yang memadai.

1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Rencana Kerja

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD dan Capaian Renstra OPD

Evaluasi pelaksanaan kegiatan diperlukan guna memperbaiki hal-hal yang menyebabkan pencapaian target kinerja kurang optimal. Evaluasi juga berguna sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya jika dirasakan manfaatnya untuk kepentingan pencapaian tujuan organisasi.

Untuk mewujudkan tujuan suatu organisasi diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai dalam mewujudkan suatu tujuan perlu ditetapkan strategi berupa kegiatan dan program. Sasaran yang hendak dicapai yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah kabupaten Jombang. Sasaran yang tertuang dalam Renstra tersebut telah dilaksanakan melalui program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 dengan rincian 2 (dua) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan.

Adapun beberapa pencapaian kinerja program kegiatan yang dilaksanakan pada awal tahun 2024 sampai dengan triwulan II adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya dokumen SAKIP OPD;
- b. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran dan meningkatnya kualitas pelayanan;
- c. Meningkatnya Potensi PAD;
- d. Meningkatnya keakuratan data Objek Pajak;
- e. Terlaksananya Penetapan serta penerbitan Data.

Beberapa hal yang perlu dilakukan agar pelaksanaan program kegiatan dapat tercapai sesuai target yang ditentukan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Kualitas Pelayanan yang didukung oleh prasarana dan sarana kerja;
- b. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD;
- c. Meningkatkan Akurasi Data Pendapatan Daerah;
- d. Tertib Administrasi Pelaporan Pendapatan Daerah.

Hasil Evaluasi pelaksanaan program kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2023 adalah digambarkan dengan matriks sebagai berikut :

Tabel 2.1 (Tabel T-C.29)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tribulan II Tahun 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2023			Target Program dan Kegiatan (Renja PD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100	4	4	8	214,40	100	20,90	20,90
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	152.891.650.000	1	1	2	168,00	152.891.650.000	100.661.323.288	65,84
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	694.000	691.000	691.000	696.867	100,85	694.000	711.365	102,50
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	152.891.650.000	147.812.645.301	147.820.050.000	185.969.721.019	125,81	152.891.650.000	100.661.323.288	65,84
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	413.800.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	413.800.000.000	7.220.305.499	1,74
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4	2	50,00
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00

5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	692.000	691.000	691.000	696.867	100,85	692.000	711.365	102,80
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4	n/a	n/a	n/a	n/a	4.000	6.850	171,25
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12	n/a	n/a	n/a	n/a	12	6	50,00
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90	101.45	90	109.32	n/a	90	101	112,72
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100	100	100	100	100,00	100	42	41,67
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3	3	3	3	100,00	3	-	0,00
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9	9	12	9	75,00	9	5	55,56
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100	100	100	100	100,00	100	92	91,57
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70	1	1.118	1.118	100,00	70	70	100,00
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00

5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	n/a	n/a	n/a	n/a	1	-	0,00
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100	n/a	n/a	n/a	n/a	100	45	45,05
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87	n/a	n/a	n/a	n/a	87	1	1,15
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5	n/a	n/a	n/a	n/a	5	1	20,00
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90	n/a	n/a	n/a	n/a	90	82	91,11
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100	100	100	100	100,00	100	53	53,25
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	2	2	2	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	7	7	7	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	8	8	8	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17	3	3	3	100,00	17	9	52,94
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48	48	48	48	100,00	48	24	50,00
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat	8	12	12	12	100,00	8	4	50,00

		Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100,00	100	50	50,00
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	100,00	12	6	50,00
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100	100	100	100	100,00	100	48	48,15
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	32	36	36	36	100,00	32	15	46,88
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100,00	1	1	100,00
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21	20	20	20	100,00	21	10	47,62

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2024, dapat dilihat melalui rencana tingkat capaian kinerja pelayanan. Tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai Visi dan Misi sesuai dengan IKK dan RPJMD yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, dapat dilaksanakan melalui beberapa aspek/fokus sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien, sehingga dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;
- b. Keselarasan dan efektifitas hubungan antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintah, serta antar Pemerintahan Daerah dalam rangka pengembangan otonomi daerah yang difokuskan pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Keselarasan antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah yang difokuskan pada masalah Pendapatan yaitu melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi, Penetapan dan penerbitan data potensi, serta pengendalian dan pelaporan penerimaan PAD secara tertib melalui pelayanan dasar dan pelayanan penunjang sesuai RPJMD;
- d. Efektifitas proses pengambilan keputusan oleh Kepala Daerah beserta tindak lanjut pelaksanaan keputusan yang difokuskan pada Peraturan Bupati terkait Pendapatan Daerah yang perlu ditindaklanjuti;
- e. Intensitas, efektivitas dan transparansi pemungutan sumber-sumber PAD;
- f. Pengelolaan Potensi Daerah yang difokuskan pada Rasio Realisasi PAD terhadap potensi PAD, dan Peningkatan PAD dari tahun sebelumnya;
- g. Pemberian fasilitas terhadap partisipasi masyarakat yang difokuskan pada bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat, serta responsifitas terhadap partisipasi masyarakat melalui survey kepuasan pelanggan.

Beberapa aspek tersebut diatas dirinci dalam matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 2.2 (T.C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Tahun 2022 s.d 17 Juli 2024
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No	Uraian	Target Tahun 2022	Capaian Tahun 2022		Target Tahun 2023	Capaian Tahun 2023		Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	
		Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%	Rp	Rp.	%
1	Pendapatan Pajak Daerah	135.421.000.000,00	172.199.090.357,00	127,16	163.627.000.000,00	185.969.721.019,00	113,65	180.183.000.000,00	99.488.571.156,00	55,22
2	Hasil Retribusi Daerah	17.491.649.455,00	20.625.241.069,53	117,91	19.862.764.623,00	24.642.310.018,00	124,06	20.400.750.103,00	6.806.720.655,00	33,37
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.924.141.742,89	4.917.041.528,56	99,86	7.308.019.425,00	5.778.730.454,51	79,07	8.206.626.422,00	1.457.265.776,61	17,76
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	307.713.781.892,08	324.440.063.150,58	105,44	361.840.818.680,00	411.768.856.235,85	113,80	384.229.164.000,00	165.318.149.301,29	43,03
		465.550.573.089,97	522.181.436.105,67	112,16	552.638.602.728,00	628.159.617.727,36	113,67	593.019.540.525,00	273.070.706.888,90	46,05

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	n/a	n/a	3,5	3,75	100	100	3,75	8,04	20.90	n/a	
2	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	n/a	n/a	1,15	1,25	152.891.650.000	294.164.752.400	1,25	2,1	100.661.323.288	n/a	
3	Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	n/a	n/a	688000	691000	694.000	697.000	691.000	696867	711.365	n/a	
4	Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	n/a	n/a	135.470.000.000	147.820.050.000	152.891.650.000	294.164.752.400	147.812.645.301	185.969.721.019	100.661.323.288	n/a	
5	Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	413.800.000.000	450.800.000.000	n/a	n/a	7.220.305.499	n/a	
6	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	4	4	n/a	n/a	2	n/a	
7	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	n/a	n/a	8	12	12	12	12	12	6	n/a	
8	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	12	6	n/a	
9	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	n/a	n/a	688.000	691.000	692.000	693.000	691.000	696.867	711.365	n/a	
10	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	3,5	4.000	n/a	n/a	6850	n/a	
11	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	12	6	n/a	

12	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	12	6	n/a	
13	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	n/a	n/a	n/a	n/a	12	12	n/a	n/a	6	n/a	
14	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	n/a	n/a	90	90	90	90	101.45	109.32	101,45	n/a	
15	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	41,67	n/a	
16	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	n/a	n/a	3	3	3	3	3	3	0	n/a	
17	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	n/a	n/a	6	12	9	9	9	9	5	n/a	
18	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	91,57	n/a	
19	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	n/a	n/a	n/a	28	70	70	1,118	1,118	70	n/a	
20	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n/a	n/a	12	12	12	12	12	12	6	n/a	
21	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	n/a	n/a	n/a	n/a	1	1	n/a	n/a	0	n/a	
22	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	n/a	n/a	n/a	n/a	100	100	n/a	n/a	45,05	n/a	
23	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	n/a	n/a	n/a	n/a	87	87	n/a	n/a	1	n/a	
24	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	n/a	n/a	n/a	n/a	5	5	n/a	n/a	1	n/a	

25	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	n/a	n/a	n/a	n/a	90	90	n/a	n/a	82	n/a	
26	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	n/a	n/a	n/a	100	100	100	100	100	53,25	n/a	
27	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	2	1	1	2	2	1	n/a	
28	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	7	1	1	7	7	1	n/a	
29	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	n/a	
30	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	8	1	1	8	8	1	n/a	
31	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	3	17	17	3	3	9	n/a	
32	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	n/a	n/a	48	48	48	48	48	48	24	n/a	
33	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	n/a	n/a	7	12	8	9	12	12	4	n/a	
34	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	50	n/a	
35	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	n/a	n/a	12	12	12	12	12	12	6	n/a	
36	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	n/a	n/a	n/a	12	12	12	12	12	6	n/a	
37	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	n/a	n/a	100	100	100	100	100	100	48,15	n/a	

38	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	n/a	n/a	31	36	32	33	36	36	15	n/a	
39	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	1	1	1	1	1	1	1	n/a	
40	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	n/a	n/a	20	20	21	24	20	20	10	n/a	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, terdapat beberapa isu penting yang perlu adanya penyelesaian dan pembentukan langkah dan arah kebijakan dalam mengatasinya.

Berdasarkan hasil analisis pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang, maka identifikasi permasalahan yang paling utama dihadapi saat ini adalah:

- a. Keakuratan Data base Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. Tersebarunya Lokasi obyek pajak di Seluruh Wilayah Kabupaten yang sulit diidentifikasi;
- c. Rendahnya kesadaran dan pemahaman WP dalam menghitung, melaporkan dan membayar pajak terhutangnya;
- d. Lemahnya penegakan sanksi hukum terhadap pelanggaran peraturan pajak daerah;
- e. Kurang optimalnya kualitas pelayanan Pajak Daerah.

Dengan demikian kesimpulan dari Isu strategis di atas adalah **Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.**

Beberapa hal yang diperlukan dalam mengatasi isu-isu penting tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Terbentuknya Sistem Pendataan yang semakin mantap, akurat, jelas dan mudah dipahami berlandaskan pada aturan pengelolaan Pendapatan yang berlaku;
- b. Terciptanya pengelolaan Pendapatan daerah yang semakin terdesentralisasi pada satuan kerja yang terkecil/desa serta berbasis pada capaian kinerja;
- c. Terwujudnya Peningkatan kualitas SDM yang memadai dan mempunyai kapasitas sesuai dengan harapan;
- d. Terciptanya kebijakan-kebijakan yang transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan yang berlaku;
- e. Terlaksananya Jasa Pendataan Pajak Daerah oleh Pihak Ketiga yang berkompeten;
- f. Terlaksananya sosialisasi tentang pengelolaan Pajak dan retribusi daerah terhadap Wajib Pajak dan Retribusi;
- g. Terciptanya Reward dan Punishment yang jelas terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan terkait APBD Daerah;
- h. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan yang memadai

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan hasil dari proses pelaksanaan perencanaan yang amanatkan di dalam Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam proses perencanaan anggaran sangat membutuhkan partisipasi dan kerjasama yang baik dari semua masyarakat (stakeholders), instansi vertikal, eksekutif maupun legislatif, sehingga proses perencanaan anggaran yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

Adapun program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 (T-C.31)
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Rencana Awal RKPD						Hasil Analisa Kebutuhan					
	Nama Program/Kegiatan/ Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju 2025	Nama Program/Kegiatan/ n/Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025	Lokasi	Usulan Anggaran (Rp.)	Prakiraan Maju 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	Bapenda	7.974.950.340	7.974.950.340	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	100%	Bapenda	7.974.950.340	7.974.950.340
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	778.365.000	778.365.000	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	778.365.000	778.365.000
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	697.000 OP	Bapenda	3.984.021.825	3.984.021.825		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	697.000 OP	Bapenda	3.984.021.825	3.984.021.825
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	2.950.063.515	2.950.063.515		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Rp 155.391.650.000	Bapenda	2.950.063.515	2.950.063.515
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rp 450.800.000.000	Bapenda	262.500.000	262.500.000		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Rp 450.800.000.000	Bapenda	262.500.000	262.500.000
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	Bapenda	315.000.000	315.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	4 dokumen	Bapenda	315.000.000	315.000.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Bapenda	3.573.150.000	3.573.150.000	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 laporan	Bapenda	3.573.150.000	3.573.150.000

5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	Bapenda	376.845.000	376.845.000	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	12 laporan	Bapenda	376.845.000	376.845.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	693.000 dokumen	Bapenda	410.871.825	410.871.825	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	693.000 dokumen	Bapenda	410.871.825	410.871.825
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	Bapenda	236.250.000	236.250.000	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4.000 layanan	Bapenda	236.250.000	236.250.000
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	2.713.813.515	2.713.813.515	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	2.713.813.515	2.713.813.515
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	86.520.000	86.520.000	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 dokumen	Bapenda	86.520.000	86.520.000
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	Bapenda	262.500.000	262.500.000	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	12 laporan	Bapenda	262.500.000	262.500.000
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	Bapenda	15.357.344.285	15.357.344.285	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	90%	Bapenda	15.357.344.285	15.357.344.285
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Bapenda	35.171.000	35.171.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	100%	Bapenda	35.171.000	35.171.000
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	Bapenda	25.000.000	25.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	3 dokumen	Bapenda	25.000.000	25.000.000
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 laporan	Bapenda	10.171.000	10.171.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	9 laporan	Bapenda	10.171.000	10.171.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Bapenda	12.917.028.300	12.917.028.300	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	100%	Bapenda	12.917.028.300	12.917.028.300

5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Bapenda	12.405.283.000	12.405.283.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	70 orang	Bapenda	12.405.283.000	12.405.283.000
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Bapenda	508.995.300	508.995.300	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 dokumen	Bapenda	508.995.300	508.995.300
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Bapenda	2.750.000	2.750.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	Bapenda	2.750.000	2.750.000
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100%	Bapenda	168.620.000	168.620.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	100%	Bapenda	168.620.000	168.620.000
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	Bapenda	26.100.000	26.100.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	87 paket	Bapenda	26.100.000	26.100.000
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang	Bapenda	50.000.000	50.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	5 orang	Bapenda	50.000.000	50.000.000
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	Bapenda	92.520.000	92.520.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	90 orang	Bapenda	92.520.000	92.520.000
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Bapenda	975.667.165	975.667.165	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	100%	Bapenda	975.667.165	975.667.165
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	13.041.380	13.041.380	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	13.041.380	13.041.380
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	506.000.000	506.000.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	506.000.000	506.000.000

5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Bapenda	2.821.500	2.821.500	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	Bapenda	2.821.500	2.821.500
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	275.007.260	275.007.260	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	Bapenda	275.007.260	275.007.260
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	Bapenda	140.411.425	140.411.425	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 paket	Bapenda	140.411.425	140.411.425
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	Bapenda	11.682.000	11.682.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	48 dokumen	Bapenda	11.682.000	11.682.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	Bapenda	26.703.600	26.703.600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9 laporan	Bapenda	26.703.600	26.703.600
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	964.889.420	964.889.420	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	964.889.420	964.889.420
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	226.820.000	226.820.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	226.820.000	226.820.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	738.069.420	738.069.420	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	Bapenda	738.069.420	738.069.420
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	295.968.400	295.968.400	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	100%	Bapenda	295.968.400	295.968.400
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 kendaraan	Bapenda	157.590.400	157.590.400	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 kendaraan	Bapenda	157.590.400	157.590.400

	Operasional atau Lapangan						Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Bapenda	39.543.000	39.543.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 gedung	Bapenda	39.543.000	39.543.000
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 sarana	Bapenda	98.835.000	98.835.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 sarana	Bapenda	98.835.000	98.835.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berpedoman pada RKPD dan berdasarkan hasil pelaksanaan forum SKPD Kabupaten, maka ditetapkan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 yang terdiri dari 2 (dua) program dan 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub kegiatan dengan jumlah total anggaran sebesar Rp. 25.193.892.815,00.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2024
Kabupaten Jombang

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	7
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	5.757.469.278	APBD 2025
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp294.164.752.400	878.650.000	APBD 2025
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	914.500.000	APBD 2025
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp294.164.752.400	3.814.004.278	APBD 2025
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	150.315.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	200.800.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	412.000.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	411.600.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	693.000 dokumen	502.500.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	300.000.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	3.514.004.278	APBD 2025
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	266.250.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	150.315.000	APBD 2025

5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	19.436.423.537	APBD 2025
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	27.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	15.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	12.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	16.908.146.525	APBD 2025
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	70 orang/bulan	16.468.029.525	APBD 2025
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	437.208.000	APBD 2025
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	2.909.000	APBD 2025
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	220.812.030	APBD 2025
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	87 paket	59.255.400	APBD 2025
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	5 orang	46.373.000	APBD 2025
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	115.183.630	APBD 2025
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.018.616.050	APBD 2025
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	21.829.150	APBD 2025
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	559.032.600	APBD 2025
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	1 paket	10.025.100	APBD 2025

5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	227.695.700	APBD 2025
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	17 paket	56.574.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	48 dokumen	11.760.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	131.699.500	APBD 2025
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	460.748.932	APBD 2025
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.520.000	APBD 2025
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.228.932	APBD 2025
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	801.100.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	442.141.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	158.325.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	24 unit	200.634.000	APBD 2025

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pelaksanaan Pembangunan di Jawa Timur tidak dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur semata, akan tetapi perlu dukungan dari stakeholders lainnya seperti Legislatif, Instansi Vertikal pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha di dalamnya juga berkewajiban untuk melaksanakan program-program pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2029. Berkaitan dengan hal tersebut, maka setiap perangkat daerah Provinsi Jawa Timur berkewajiban untuk menyusun Renstra dengan muatan Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pokok serta Prioritas Pembangunan sesuai dengan Tugas dan Fungsinya sehingga terwujud koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara berkesinambungan sampai dengan akhir periode RPJMD.

Visi RPJPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada periode 2025-2045 adalah “ Jawa Timur Berakhlak, Maju, Berdaya saing global, sejahtera, dan berkelanjutan”. Untuk mewujudkan Visi tersebut, ditempuh melalui 4 (empat) Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan transformasi sosial yang inklusif
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
4. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi
5. Pembangunan kewilayahan dan penyediaan sarana dan prasarana berwawasan lingkungan
6. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan

Untuk dapat mewujudkan Visi dan Misi, beserta Tujuan dan Sasaran berdasarkan rumusan diatas, maka dilaksanakan 2 (dua) strategi umum sebagai berikut:

1. Implementasi sistem meretokratik, complaint handling system, membangun birokrasi anti korupsi dan penguatan SPIP;
2. Mendorong sound governance, pelayanan berbasis IT, implementasi e-government guna pemanfaatan data pembangunan secara optimal;

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana dijabarkan diatas, maka dukungan utama yang diberikan oleh Bapenda Provinsi Jawa Timur adalah memastikan penerimaan pendanaan program pembangunan Provinsi Jawa Timur melalui pemungutan PAD secara akuntabel dan meningkatkan kualitas

penyelenggaraan pelayanan publik bidang pembayaran Pajak. Beberapa permasalahan yang mengemuka misalkan berkaitan dengan masalah kebutuhan fasilitasi legislasi peraturan perundang-undangan, masalah umum dalam tata usaha, perencanaan serta beberapa hal lain yang menyangkut aspek sumberdaya manusia maupun apsek teknis administrasi. Penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisis atas permasalahan layanan dengan melibatkan seluruh stakeholders melalui diskusi dua arah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 merupakan penjabaran rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang mengacu pada visi dan misi pemerintah daerah serta kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan Daerah tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokras	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	$X = \frac{(\text{Realisasi PAD tahun } n) - (\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)}{(\text{Realisasi PAD tahun } n - 1)} \times 100\%$
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Nilai evaluasi AKIP	Nilai Evaluasi SAKIP tahun n
	Terlaksananya Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai target	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	$X = \frac{\text{Realisasi PAD tahun } n}{\text{Target PAD tahun } n} \times 100\%$
	Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Prosentase Rata – rata capaian Kinerja Aparatur sipil negara	$X = \frac{\text{Jumlah capaian kinerja seluruh pegawai}}{\text{Jumlah pegawai}} \times 100\%$

3.3 Program dan Kegiatan

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 25.193.892.815,00 melalui 2 (dua) Program, 7 (tujuh) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan) Sub. kegiatan yang dilaksanakan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator/Keluaran
------	-------------------------------------	--------------------

5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - rata capaian kinerja aparatur sipil negara
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan

5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Dari uraian tersebut diatas dapat di lihat pada rincian tabel matriks Rencana kerja (Renja) tahun 2025, berikut ini :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang

Kode	Nama Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2025					Prakiraan Maju	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana	Catatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	5.757.469.278	APBD 2025		100%	6.045.342.742
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp294.164.752.400	878.650.000	APBD 2025		Rp294.164.752.400	922.582.500
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	914.500.000	APBD 2025		697.000 objek pajak	960.225.000
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp294.164.752.400	3.814.004.278	APBD 2025		Rp294.164.752.400	4.004.704.492
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	150.315.000	APBD 2025		Rp450.800.000.000	157.830.750
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	200.800.000	APBD 2025		4 dokumen	210.840.000
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	412.000.000	APBD 2025		12 laporan	432.600.000
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	411.600.000	APBD 2025		12 laporan	432.180.000
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	693.000 dokumen	502.500.000	APBD 2025		693.000 dokumen	527.625.000
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	300.000.000	APBD 2025		4.000 layanan	315.000.000

5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	3.514.004.278	APBD 2025		12 dokumen	3.689.704.492
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	266.250.000	APBD 2025		12 dokumen	279.562.500
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	150.315.000	APBD 2025		12 laporan	157.830.750
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	19.436.423.537	APBD 2025		90%	20.408.244.714
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	27.000.000	APBD 2025		100%	28.350.000
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	15.000.000	APBD 2025		3 dokumen	15.750.000
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	12.000.000	APBD 2025		9 laporan	12.600.000
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	16.908.146.525	APBD 2025		100%	17.753.553.851
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	70 orang/bulan	16.468.029.525	APBD 2025		70 orang/bulan	17.291.431.001
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	437.208.000	APBD 2025		12 dokumen	459.068.400
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	2.909.000	APBD 2025		1 laporan	3.054.450

5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	220.812.030	APBD 2025		100%	231.852.632
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	87 paket	59.255.400	APBD 2025		87 paket	62.218.170
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	5 orang	46.373.000	APBD 2025		5 orang	48.691.650
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	115.183.630	APBD 2025		90 orang	120.942.812
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.018.616.050	APBD 2025		100%	1.069.546.853
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	21.829.150	APBD 2025		1 paket	22.920.608
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	559.032.600	APBD 2025		1 paket	586.984.230
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	1 paket	10.025.100	APBD 2025		1 paket	10.526.355
5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	227.695.700	APBD 2025		1 paket	239.080.485
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	17 paket	56.574.000	APBD 2025		17 paket	59.402.700
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Bapenda	48 dokumen	11.760.000	APBD 2025		48 dokumen	12.348.000
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	131.699.500	APBD 2025		9 laporan	138.284.475
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	460.748.932	APBD 2025		100%	483.786.379

5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.520.000	APBD 2025		12 laporan	242.046.000
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.228.932	APBD 2025		12 laporan	241.740.379
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	801.100.000	APBD 2025		100%	841.155.000
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	442.141.000	APBD 2025		33 unit	464.248.050
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	158.325.000	APBD 2025		1 unit	166.241.250
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	24 unit	200.634.000	APBD 2025		24 unit	210.665.700

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan

Sebagai tindak lanjut dari RPJMD adalah disusunnya Dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang. RKPD Kabupaten Jombang sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 110 Tahun 2023 menyebutkan bahwa, Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 terdapat pada Misi ke 2 (dua), yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan Profesional"**.

Refleksi dari hal tersebut adalah meningkatnya partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam menggali dan menumbuhkembangkan potensi lokal yang bermuara kepada meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan daerah, sehingga mampu meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi untuk mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat dengan cara peningkatan pendapatan daerah.

Hal tersebut yang menjadi dasar Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang melaksanakan program kegiatan yang dituangkan dalam Rencana kerja OPD Tahun 2025 melalui Visi yaitu:

"BERSAMA MEWUJUDKAN JOMBANG YANG BERKARAKTER DAN BERDAYA SAING"

melalui misi kedua yaitu :

"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Dan Profesional"

Dilihat dari matriks Renstra OPD tahun 2024-2026, tujuan strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang adalah Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokras. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran yang terarah agar komponen dalam suatu organisasi memahami sasaran yang akan dicapai. Sasaran Strategis badan Pendapatan Daerah adalah Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam mewujudkan hal tersebut, perlu ditetapkan strategi berupa program dan kegiatan, dengan indikator program dan kegiatan serta pagu indikatif anggaran. Sasaran yang hendak dicapai.

Anggaran yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang yang tertuang dalam Renja Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 25.193.892.815,00 dengan rincian Program dan kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 5.757.469.278,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target 100%
Kegiatan Pada Program ini antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 778.365.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan Rp. 294.164.752.400,00
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 914.500.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan 697.000 OP
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.814.004.278,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang Diterima Terhadap Penetapan Rp. 294.164.752.400,00
- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 150.315.000,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah Rp. 450.800.000.000,00

Sub Kegiatan pada Kegiatan ini antara lain :

- a. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 200.800.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 4 Dokumen
- b. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 412.000.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah 12 Laporan
- c. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 411.600.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan,

dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 12 Laporan

- d. Penetapan Wajib Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 502.500.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah 693.000 Dokumen
- e. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 300.000.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4000 Layanan
- f. Penagihan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 3.514.004.278,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah 12 Dokumen
- g. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 266.250.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah 12 Dokumen
- h. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 - Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 150.315.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 - Hasil : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah 12 Laporan

B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 19.436.423.537,00
- Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
- Hasil : Prosentase Rata-rata capaian kinerja aparatur sipil negara 90%

Kegiatan Pada Program ini antara lain :

- 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Masukan : Jumlah Dana Rp. 27000.000,00
 - Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan,
Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 15.000.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3
Dokumen

b. Koordinasi dan Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 12.000.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Capaian Kinerja PD 9 Laporan

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 16.908.146.525,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi
Keuangan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 16.468.029.525,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan
ASN 70 Orang/bulan

b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan
SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 437.208.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Verifikasi
Keuangan SKPD 12 Dokumen

c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 2.909.000,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang

Hasil : Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD 1 Laporan

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 220.812.030,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Prosentase Penyediaan Kebutuhan Administrasi
 Kepegawaian PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 59.255.400,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut
 Kelengkapan 87 paket
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 46.373.000,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang
 Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan 5 Orang
- c. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 115.183.630,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis
 Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 90 Orang

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 1.018.616.050,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Prosentase Tersusunnya Dokumen Administrasi
 Umum PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 21.829.150,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Jumlah Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
 Bangunan Kantor 1 Paket
- b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 559.032.600,00
 Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
 Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
 Kantor 1 Paket
- c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 10.025.100,00

Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
1 Paket

d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 227.695.700,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
1 Paket

e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 56.574.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan
yang Disediakan 17 Paket

f. Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 11.760.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang – Undangan 48 Dokumen

g. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 131.699.500,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan konsultasi SKPD 9 Laporan

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 460.748.932,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD
100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 230.520.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 Laporan

b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 230.228.932,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum

Kantor 12 Laporan

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Masukan : Jumlah Dana Rp. 801.100.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD 100%

Sub Kegiatan pada kegiatan ini antara lain :

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 442.141.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya 33 unit
- b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 158.325.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 1 unit
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Masukan : Jumlah Anggaran Rp. 200.634.000,00
Sumber Dana : APBD Tahun 2025 Kabupaten Jombang
Hasil : Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi 24 unit

Dari uraian dan rincian tersebut diatas dapat di lihat pada tabel matriks rencana kerja dan Kerangka Pendanaan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025, berikut ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang
Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang urusan pemerintahan daerah program / kegiatan / sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Rencana Kerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Indikatif	Sumber Dana
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Jumlah Realisasi PAD terhadap Target	Bapenda	100%	5.757.469.278	APBD 2025
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Potensi Pajak dari data Obyek Pajak hasil Pendataan	Bapenda	Rp294.164.752.400	878.650.000	APBD 2025
		Jumlah Penetapan Pajak dari Obyek Pajak yang ditetapkan	Bapenda	697.000 objek pajak	914.500.000	APBD 2025
		Jumlah Capaian Penagihan Pajak yang diterima terhadap penetapan	Bapenda	Rp294.164.752.400	3.814.004.278	APBD 2025
		Jumlah Realisasi PAD Non Pajak Daerah	Bapenda	Rp450.800.000.000	150.315.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Bapenda	4 dokumen	200.800.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Bapenda	12 laporan	412.000.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak	Bapenda	12 laporan	411.600.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Bapenda	693.000 dokumen	502.500.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Bapenda	4.000 layanan	300.000.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penagihan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	3.514.004.278	APBD 2025
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Bapenda	12 dokumen	266.250.000	APBD 2025
5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah	Bapenda	12 laporan	150.315.000	APBD 2025

5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Rata - Rata Capaian Kinerja Aparatur	Bapenda	90%	19.436.423.537	APBD 2025
5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD	Bapenda	100%	27.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang tersusun	Bapenda	3 dokumen	15.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja yang tersusun	Bapenda	9 laporan	12.000.000	APBD 2025
5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Keuangan PD	Bapenda	100%	16.908.146.525	APBD 2025
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Bapenda	70 orang/bulan	16.468.029.525	APBD 2025
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Bapenda	12 dokumen	437.208.000	APBD 2025
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Bapenda	1 laporan	2.909.000	APBD 2025
5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Kepegawaian PD	Bapenda	100%	220.812.030	APBD 2025
5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Bapenda	87 paket	59.255.400	APBD 2025
5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Paket Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Bapenda	5 orang	46.373.000	APBD 2025
5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Paket Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bapenda	90 orang	115.183.630	APBD 2025
5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Dokumen Administrasi Umum PD	Bapenda	100%	1.018.616.050	APBD 2025
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	21.829.150	APBD 2025
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	559.032.600	APBD 2025
5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Bapenda	1 paket	10.025.100	APBD 2025

5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bapenda	1 paket	227.695.700	APBD 2025
5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bapenda	17 paket	56.574.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Bapenda	48 dokumen	11.760.000	APBD 2025
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bapenda	9 laporan	131.699.500	APBD 2025
5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	460.748.932	APBD 2025
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.520.000	APBD 2025
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bapenda	12 laporan	230.228.932	APBD 2025
5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan PD	Bapenda	100%	801.100.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bapenda	33 unit	442.141.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	1 unit	158.325.000	APBD 2025
5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bapenda	24 unit	200.634.000	APBD 2025

BAB V

PENUTUP

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jombang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah, yang dalam rangka mewujudkan good governance, dituntut untuk mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya di bidang Pendapatan daerah. Guna menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan suatu pedoman dan arahan yang termuat dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan yang dijadikan pedoman, acuan dan arahan dalam melaksanakan program kegiatan, arah, tujuan dan strategi kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang dalam kurun waktu tahun 2025, dalam rangka menciptakan Sistem dan Prosedur yang ideal dalam rangka peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Daerah. Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian upaya Badan Pendapatan Daerah dalam kurun waktu tahun 2025, sehingga dapat lebih terarah dan terukur. Untuk itu diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen yang kuat dari seluruh aparatur Badan Pendapatan Daerah, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Kerja Tahun 2025 ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, akan tetapi juga sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai.

Demikian Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang tahun 2025 disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan program kegiatan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang. Harapan kami, semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik disertai kerja keras dan dedikasi yang tinggi dari segenap aparatur sipil negara di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mewujudkan Jombang Sejahtera untuk Semua.